

**PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI  
KASUS DUA KELURAHAN DI KOTA DENPASAR)**

**A.A.Sg Erry Ernovianthy  
I Gusti Wayan Murjana Yasa**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Kondisi perekonomian yang stabil serta kondisi sosial dan budaya yang lebih baik merupakan tujuan utama pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Partisipasi adalah aktif dan terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah yang telah direncanakan. Rendahnya partisipasi dari masyarakat mengakibatkan program pembangunan mengalami kegagalan dalam proses pencapaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Kelurahan Padangsembian dan Kelurahan Sesetan merupakan dua kelurahan yang menjadi lokasi penelitian ini karena memiliki jumlah penduduk pendatang terbanyak dari kelurahan lainnya di Kota Denpasar. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan observasi non partisipan dengan jumlah sampel 120 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah *binary logistic*. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat Kelurahan Padangsembian dan Sesetan dalam tertib administrasi kependudukan tergolong tinggi. Variabel umur, status kependudukan, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, status pekerjaan, dan status kepemilikan rumah berpengaruh secara simultan terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Secara parsial, diantara variabel tersebut hanya variabel status kepemilikan rumah yang tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

Kata Kunci : *partisipasi masyarakat, tertib administrasi kependudukan, status kependudukan, kondisi sosial ekonomi*

**Abstract**

Stable economic conditions as well as the social and cultural conditions which better represents the main goal of development to achieve the welfare of the community. Is the active participation and involvement of the community in the implementation of government programs that have been planned. Low participation of the community development program resulted in the failure to meet it. This study aims to determine how high the level of community participation in the orderly administration of residence and how the influence of socio-economic conditions of people's participation in the orderly administration of residence.. Sub-district and village Padangsembian Sesetan are two villages that became the location of this study because it has the highest number of migrants from other villages in the city of Denpasar. Data were collected through structured interviews and non-participant observation with a sample of 120 respondents.

Analytical techniques used are binary logistic. These results indicate the participation of village communities Padangsambian and Sesetan the orderly administration of relatively high population. Variables age, residence status, education level, household income, residence status and home ownership status simultaneously affect the people's participation in orderly administration of population. Partially, the only variable between the variable home ownership status had no effect in orderly administration of population.

Keywords: *community participation, population administration discipline, residence status, socio-economic conditions.*

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan, yaitu dapat dilihat dari kondisi perekonomian yang stabil serta kondisi sosial dan kebudayaan yang lebih baik dari sebelumnya. Proses pembangunan melibatkan masyarakat untuk mendorong lancarnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien karena masyarakat adalah subyek (pelaku) dan sekaligus obyek dalam pembangunan. Partisipasi merupakan aktif dan terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan (Rono dan Abdillahi, 2003:77). Denpasar merupakan ibukota Provinsi Bali yang menjadi tujuan utama kehadiran migran di daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di kota ini menjadi tertinggi di Bali. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, tingkat kepadatan penduduk di Kota Denpasar sebesar 6.171 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk di Kota Denpasar sebesar 6.171 jiwa per km<sup>2</sup> yang merupakan tingkat kepadatan terbesar di Bali yang menunjukkan bahwa distribusi penduduk tidak merata yang berpusat di daerah perkotaan. Jumlah penduduk migran di Kota Denpasar sebesar 415.417 jiwa, sedangkan jumlah penduduk non migran lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk migran di Kota Denpasar yaitu sebesar 373.172 jiwa yang artinya penduduk pendatang (*migrant*) mendominasi wilayah Kota Denpasar (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2010).

Migrasi merupakan salah satu variabel demografi penting yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk daerah perkotaan. Migrasi adalah pergerakan penduduk dari suatu tempat ketempat yang lain secara geografis (Firman dalam Elidawati, 2003:6). Proses masuknya penduduk pendatang tentu harus diikuti dengan proses administrasi kependudukan. Seseorang bila akan berdomisili pada suatu wilayah maka harus memiliki tanda domisili yaitu kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KIPS (Kartu Identitas Penduduk Sementara) bagi para pendatang. Penduduk pendatang seharusnya mempunyai kesadaran untuk melaksanakan proses administrasi kependudukan yang berakibat pada adanya perbedaan antara data yang ada dengan kenyataan dilapangan, sehingga lambat laun akan menjadi sebuah permasalahan dalam proses administrasi kependudukan. Permasalahan tersebut diatasi dengan diberlakukannya penataan bidang administrasi kependudukan yaitu dalam UU No. 23 Tahun 2006.

Menurut Mantra (2003:1) data kependudukan memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan sehingga dengan akurat dan lengkapnya data kependudukan akan mempermudah dan memperlancar rencana pembangunan. Data kependudukan dapat diperoleh dengan sensus penduduk dan registrasi penduduk. Sensus penduduk adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penilaian data penduduk yang menyangkut ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup, sedangkan registrasi penduduk adalah proses pengumpulan data dari komponen penduduk berupa kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan yang dapat terjadi saat tidak dapat terjaring dalam sensus

penduduk. Hasil perolehan data kependudukan yang didapat tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam tertib administrasi kependudukan.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam bidang administrasi kependudukan yaitu pelanggaran dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk migran maupun non-migran, banyaknya kepemilikan KTP ganda, ketidakpemilikan Kartu Keluarga (KK), dan banyak penduduk migran yang tidak melapor kepada aparat setempat (Artayasa, 2012). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, jumlah total penduduk Kota Denpasar yang tidak memiliki KTP sebesar 80.174 jiwa atau 17,95 persen dari jumlah penduduk wajib KTP sejumlah 446.525 jiwa, dengan Kecamatan Denpasar Barat sebagai wilayah terbanyak yang tidak memiliki KTP yaitu sejumlah 22.046 jiwa (27,49 persen) dan posisi kedua Kecamatan Denpasar Selatan sejumlah 21.478 jiwa (26,79 persen) merupakan wilayah yang masih banyak melakukan pelanggaran administrasi kependudukan yaitu tidak memiliki identitas KTP.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya sebagai berikut.

- 1) Seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Padangsembian dan Kelurahan Sesetan Kota Denpasar?
- 2) Apakah variabel umur, status kependudukan, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, jenis pekerjaan dan status kepemilikan rumah berpengaruh secara simultan terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan?
- 3) Apakah variabel umur, status kependudukan, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, jenis pekerjaan dan status kepemilikan rumah berpengaruh secara parsial terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan?

## **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

Partisipasi adalah keinginan masyarakat dalam mendukung program pemerintah yang direncanakan oleh pemerintah, serta kerjasama yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan (Soetrisno, 1995:89). Terlibatnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan terbagi dalam beberapa tingkatan. Menurut Arstein (dalam Sumiyarsono, 2010:51) penilaian masyarakat tentang partisipasi atau peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi yaitu manipulasi, terapi, pemberi informasi, konsultasi, perujukan, kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan masyarakat yang mengontrol.

Administrasi adalah setiap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi kependudukan mencakup pembuatan identitas diri berupa KTP, KK, pelaporan bagi penduduk pendatang, pembuatan akta kelahiran, akta kematian dan sebagainya dalam bidang kependudukan. Administrasi kependudukan yang tertib akan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang memerlukan data kependudukan tersebut, baik individu, pemerintah, maupun pihak yang berkepentingan.

Litwin (Sutami, 2009:38) mengatakan bahwa salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan adalah ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Tingginya pengetahuan akan mempengaruhi

seseorang dalam turut terjun berpartisipasi karena pengetahuan yang tinggi berarti mengetahui pentingnya manfaat dan kesadaran berpartisipasi.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Padangsambian dan Kelurahan Sasetan tergolong tinggi.
- 2) Faktor keadaan sosial ekonomi meliputi aspek umur, status kependudukan, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, status pekerjaan, serta status kepemilikan rumah secara simultan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.
- 3) Faktor keadaan sosial ekonomi meliputi aspek umur, status kependudukan, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, status pekerjaan, serta status kepemilikan rumah secara parsial berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian kuantitatif berbentuk asosiatif yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Rancangan penelitian kuantitatif yaitu berasal dari teori atau temuan-temuan orang lain. Selanjutnya disusun hipotesis sesuai dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Denpasar tepatnya di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat dan di Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Obyek dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di kelurahan Padangsambian dan Kelurahan Sasetan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu dalam penelitian ini adalah keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tertib administrasi kependudukan (Y) diukur dengan skala *dummy* (1= tertib dan 0= kurang tertib). Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah umur ( $X_1$ ) diukur dalam satuan tahun, status kependudukan ( $X_2$ ) diukur dengan *dummy* variabel, dimana bernilai 1 jika responden penduduk asli dan bernilai 0 jika responden penduduk pendatang, tingkat pendidikan ( $X_3$ ) diukur berdasarkan umur pendidikan terakhir responden terpilih melalui satuan tahun, pendapatan rumah tangga ( $X_4$ ) jumlah uang yang diterima per bulan yang diperoleh oleh seluruh anggota yang bekerja berupa rupiah, status pekerjaan ( $X_5$ ) diukur dengan variabel *dummy* dimana 1 adalah bekerja dan 0 untuk tidak bekerja serta status kepemilikan rumah ( $X_6$ ) diukur dengan *dummy* variabel, dimana bernilai 1 jika responden rumah milik sendiri sedangkan yang status kepemilikan rumah lainnya seperti menyewa, mengontrak dan kost diberi nilai 0.

Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu uraian-uraian mengenai partisipasi, partisipasi masyarakat, administrasi kependudukan, umur, status kependudukan, pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan kepemilikan rumah tangga. Data kuantitatif dalam hal ini yang digunakan adalah jumlah migran dan non-migran di Kota Denpasar, jumlah penduduk di Kelurahan Padangsambian dan Sasetan, dan jumlah penduduk Kota Denpasar menurut Kepemilikan KTP yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisisioner yang telah di siapkan, sedangkan data sekunder yang digunakan penelitian ini berupa data jumlah penduduk

migran dan non migran di Kota Denpasar dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kota Denpasar menurut kepemilikan KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk pendatang per kelurahan/desa di kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan.

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Padangsambian dan Kelurahan Sesetan adalah *Binary Logistic Regression Model* dengan program *Statistical Package for the Social Sciences for Windows*. Model ekonometrika dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{P}{1-P} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \mu$$

Dimana :

$P$	:	Probabilitas tertib administrasi
$1-P$	:	Probabilitas kurang tertib administrasi
$X_1$	:	Umur
$X_2$	:	Status kependudukan
$X_3$	:	Tingkat pendidikan
$X_4$	:	Pendapatan
$X_5$	:	Status pekerjaan
$X_6$	:	Status kepemilikan rumah
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	:	Koefisien regresi variabel
$\mu$	:	Standar Error (variabel pengganggu)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tingkat partisipasi masyarakat yang terdiri dari indikator kepemilikan dokumen, pelaporan kependudukan dan partisipasi dalam pemecahan masalah tersebut dirata-ratakan sehingga menghasilkan nilai yang menunjukkan kondisi dari pada pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Padangsambian dan Kelurahan Sesetan. Tingkat partisipasi masyarakat dapat diketahui dengan melihat nilai rata-rata dari hasil jawaban responden yang menjawab “Ya” pada kuisioner. Adapun kriteria tingkatan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- 1) Sangat rendah, bila memiliki rata-rata :  $\leq 20$
- 2) Rendah, bila memiliki rata-rata : 20,1 – 40
- 3) Sedang, bila memiliki rata-rata : 40,1 – 60
- 4) Tinggi, bila memiliki rata-rata : 60,1 – 80
- 5) Sangat tinggi, bila memiliki rata-rata : 80,1 – 100

Berikut adalah rekapitulasi partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

Tabel 1. Partisipasi Masyarakat dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan Pdangsambian dan Kelurahan Sesetan Kota Denpasar.

No	Indikator Partisipasi	Rata-rata	Kriteria
1	Kepemilikan Dokumen	96,67	Sangat Tinggi
2	Pelaporan Kependudukan	77,5	Tinggi
3	Pemecahan Masalah Kependudukan	85,33	Sangat Tinggi

Rata-rata	86,49	Sangat Tinggi
-----------	-------	---------------

Sumber : Hasil olah data, 2013

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata dari masing-masing indikator partisipasi yaitu kepemilikan dokumen, pelaporan kependudukan dan partisipasi dalam pemecahan masalah kependudukan sebesar 86,49 persen yang artinya partisipasi dari responden di Kelurahan Padangsambian dan Kelurahan Sesetan menunjukkan partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam tertib administrasi kependudukan.

Untuk melihat apakah variabel-variabel independen dalam model berpengaruh simultan terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari Tabel *Omnibus Test of Model Coefficients*.

Tabel 2. *Omnibus Test of Model coefficients*

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	27.946	6	.000
	Block	27.946	6	.000
	Model	27.946	6	.000

Tabel 3. Kesesuaian Prediksi dan Hasil Observasi

Observed	Predicted				
	Tertib Adm		Percentage Correct		
	Kurang Tertib	Tertib			
Step 1	Tertib Adm	Kurang Tertib	10	18	35,7
		Tertib	5	87	94,6
	Overall v	Percentage			80,8

Berdasarkan Tabel 2 *Omnibus Test of Model Coefficients* untuk pengujian simultan nilai  $\chi^2$  hitung = 27,946 dengan Sig 0,000 yang artinya variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi logistik secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Pada Tabel 3 ditunjukkan besarnya pengaruh simultan tersebut sebesar 80,8 persen yaitu kesesuaian prediksi dan hasil penelitian.

Untuk melihat apakah variabel-variabel independen dalam model berpengaruh parsial terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari Tabel *Variables in the equation*.

Tabel 4. *Variables in the equation*

		$\beta$	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	Umur	.112	.042	7.241	1	.007	1.118
	Statuskependudukan	1.482	.665	4.972	1	.026	4.401
	Tingkatpendidikan	.271	.133	4.130	1	.042	1.311
	pendapatanRT	.000	.000	9.001	1	.003	1.000
	Statuspekerjaan	1.567	.640	5.995	1	.014	4.791
	Statuskepemilikanrumah	-.778	.664	1.374	1	.241	.459
	Constant	-6.389	2.322	7.570	1	.006	.002

Secara parsial umur ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Padangsambian dan Kelurahan Sesetan, dapat dilihat dari nilai signifikan umur 0,007 lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen yang artinya umur berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Hal tersebut berarti semakin meningkatnya umur seseorang, maka partisipasi dalam tertib administrasi akan semakin tinggi.

Status kependudukan ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Nilai dari signifikan status kependudukan 0,026 lebih kecil dari taraf signifikan 5 persen yang berarti status kependudukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Tingkat pendidikan ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,042 lebih kecil dari taraf signifikan 5 persen. Pendapatan rumah tangga ( $X_4$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan yang ditunjukkan dengan nilai signifikan pendapatan rumah tangga 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen yang artinya variabel pendapatan rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi tertib administrasi kependudukan.

Status pekerjaan ( $X_5$ ) memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dimana nilai signifikan status pekerjaan 0,014 lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen. Status kepemilikan rumah ( $X_6$ ) tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

## **SIMPULAN**

- 1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Padangsambian dan Kelurahan Sesetan Kota Denpasar masuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu sebesar 86,49 persen yang artinya penduduk sudah aktif dan sadar akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan.
- 2) Variabel umur, status kependudukan, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, status pekerjaan dan status kepemilikan rumah secara simultan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.
- 3) Secara parsial Variabel umur, status kependudukan, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga dan status pekerjaan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan, sedangkan status kepemilikan rumah tidak berpengaruh.

## **SARAN**

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pelaporan kedatangan tamu atau keluarga perlu ditingkatkan untuk terlaksananya tertib administrasi kependudukan.
- 2) Pemerintah Kota menghimbau kepada pemerintah desa/kelurahan untuk lebih agresif dan terperinci mendata penduduk di wilayahnya sebab dengan lengkapnya data-data pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan atas permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada.
- 3) Pemerintah kota melakukan pengawasan kepada pemerintah desa/kelurahan dalam mengawasi pelayanan serta kinerja dari pemerintah desa sebab pelayanan merupakan

salah satu faktor penting dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

## REFERENSI

- Artayasa, I Nyoman. 2012. Ini Penyebab Banyak Warga ‘Gelap’ Denpasar. <http://id.berita.yahoo.com/ini-penyebab-banyak-warga-gelap-denpasar-151841460.html>. Diunduh tanggal 24, bulan Januari, tahun 2013.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Jumlah Penduduk menurut status Migran/Non Migran berdasarkan Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2010.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. 2012. Jumlah Penduduk wajib KTP, Jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP, dan Jumlah Penduduk yang memiliki KTP di Kota Denpasar Tahun 2012 Berdasarkan Kecamatan.
- Elidawati. 2003. Pengaruh Masyarakat Pendatang terhadap Kesejahteraan Penduduk Lokasi (Kasus “pemukiman” mahasiswa IPB di Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat). *Skripsi* Sarjana Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rono, Philip K. and Abdillahi A. Aboud. 2003. The Role of Popular Partisipation and Community Work Ethic in Rural Development: The Case of Nandi District Kenya. *Journal of Social Development in Africa*, 18(2), pp:77-103.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumiyarsono, Elmi. 2010. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih di Desa Wowoosu dan Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Tesis* Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Manajemen Prasarana Perkotaan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutami. 2009. Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara. Dalam *Tesis* Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.